Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp.496 -504
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 496

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan *Good Governance* sebagai Variabel Intervening pada BPKAD Kota Surakarta

Naufi Rosty Tsabita[1], Aris Eddy Sarwono[2], Bambang Widarno[3]
[1]Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, e-mail: rostyytsabita07@gmail.com
[2]Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, e-mail: arissarwono74@gmail.com
[3]Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, e-mail: bwidarnozoom@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 July 2025
Received in revised form 22 October 2025
Accepted 31 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Public Sector Accounting Implementation and Internal Control on the Performance of Local Government Agencies with Good Governance as an intervening variable at BPKAD Surakarta City using a quantitative approach. The sample in this study consisted of 50 respondents, who were employees of BPKAD Surakarta City. The sampling technique used purposive sampling. The results of the study indicate that Public Sector Accounting Implementation has a significant negative effect on Good Governance, while Internal Control has a significant positive effect on Good Governance. Public Sector Accounting Implementation shows a negative and insignificant effect on the performance of local government agencies, whereas Internal Control and Good Governance both have a significant positive effect on performance. However, Good Governance is unable to mediate the relationship between Public Sector Accounting Implementation and Internal Control on the performance of local government agencies.

Keywords: *Public Sector Accounting, Internal Control, Good Governance, Local Government Perfomance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Good Governance sebagai variabel intervening pada BPKAD Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden yang merupakan pegawai BPKAD Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi, dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh negatif signifikan terhadap Good Governance, sedangkan Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Good Governance. Penerapan Akuntansi Sektor Publik menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sementara Pengawasan Internal dan Good Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Namun, Good Governance tidak mampu memediasi hubungan antara Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Received July 25, 2025; Revised October 22, 2025; Accepted October 31. 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, *Good Governance*, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan akuntansi sektor publik di Indonesia, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas kinerja pemerintah semakin mendesak. Tuntutan ini mendorong lembaga pemerintah untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas dan kinerja mereka kepada public (Rahmawati & Heliana, 2022). Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis di Indonesia pada saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *Good governance* (Yahya, 2016). Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti kepentingan politik, kerja ilegal, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pemborosan dana oleh oknum tertentu (Mubarok kk, 2021).

Dalam konsep *good governance*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan sosial kepada masyarakat yang didukung oleh sistem peradilan yang baik dan mekanisme pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Israr & Syofyan, 2022). Indonesia telah menerapkan konsep *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu mekanisme yang digunakan oleh negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial dengan berorientasi pada pembangunan masyarakat guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah adalah dengan menerapkan pengawasan internal sebagai fungsi manajerial dalam mengelola pemerintahan (Pratama & Rauf, 2021). Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan suatu pengawasan internal atas pelaksanaan pemerintah daerah (Wahidahwati, 2021). Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan, maka akan mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang efektif. Pengawasan internal dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif (Irene dkk., 2024).

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, seperti pengendalian akuntansi, kompetensi, good governance, kualitas laporan keuangan, penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, dan transparansi (Karlina dkk. 2023; Rahayu & Hendaris, 2022; Ayu, 2024; Gea, 2021; Putri & Murialti, 2021; Israr & Syofyan, 2022; Kusuma & Mildawati, 2021; Ariatin, 2021).

Kota Surakarta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2011 (https://radarsolo.jawapos.com/2024). Kinerja instansi pemerintah di Kota Surakarta khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022-2024 mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama antara BPKAD Kota Surakarta dengan Manajemen Solo Techno Park dalam pengelolaan aset yang diwujudkan dalam creative hub di solo techno park dan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dengan nilai investasi tembus sebesar Rp 137 Miliar (https://radarsolo.jawapos.com/2022).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel Intervening".

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Keagenan (Agenchy Theory)

Teori keagenan *(agency theory)* yang dikembangkan (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang membahas mengenai keagenan, dimana satu pihak tertentu (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan melimpahkan kewenangan untuk mengabil suatu keputusan kepada agen tersebut selaku pengelola organisasi. Teori keagenan yang menekankan pentingnya pengendalian dan pelaporan dalam hubungan principal-agent agar tercipta trust dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik (Rahmawati & Puspitasari, 2021). Teori keagenan menjadi landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan bagaimana mekanisme-mekanisme tersebut saling terkait dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Sari & Suryanto, 2020).

3. HIPOTESIS

3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap *Good Governance*

Menurut (Belinda & Costari, 2021) akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh organisasi publik sebagai alat untuk menyampaikan laporan kepada khalayak umum. Masyarakat terus menuntut agar lembaga publik menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Penerapan akuntansi sektor publik merupakan sebuah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan dengan baik, serta memastikan bahwa semua pihak telah melaksanakan tugasnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Gea (2021) dan Karlina, dkk (2023) mneyatakan bahwa Penerapan akuntansi sektor public berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*

3.2. Pengaruh Pengawasan Internal berpengaruh terhadap *Good Governance*

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan pengawasan internal merupakan seluruh rangkaian, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila sistem pengawasan internal pemerintah diimplementasikan secara optimal, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2020) dan Irene, dkk (2024) menyebutkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap *good governance*.

H_2: Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good governance*

3.3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntansi sektor publik difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi daya tarik sektor publik yang selama ini dianggap kurang optimal, agar mampu bersaing dengan sektor swasta yang lebih maju dan efisien. Hal ini mencakup perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan, serta pengelola dampak finanasial dari kebijakan yang diterapkan pemerintah (Adrian, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2024), Irene dkk (2024), dan Rafarni Gea dkk (2021) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

H3: Penerapan akuntansi sektor public berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

3.4. Pengaruh Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam instansi itu sendiri. Pengawasan ini bertugas untuk mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh instansi. (Irene dkk., 2024) dan (Rahayu & Budi, 2022) menyebutkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina dkk., 2023) menyatakan bahwa sistem pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

H_4: Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

3.5. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Penerapan *good governance* yang responsif dan berintegritas dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah daerah dan dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian yang disampaikan oleh (Karlina dkk., 2023) mengemukakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

H_5: *Good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

3.6. Pengaruh *Good Governance* Dalam Memediasi Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tingkat keberhasilan pelayanan tersebut dapat diindikasikan melalui kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Namun demikian, efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah tidak terlepas dari pengaruh sejumlah faktor, salah satunya adalah implementasi prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaannya. (Karlina dkk., 2023).

H_6: *Good governance* memediasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

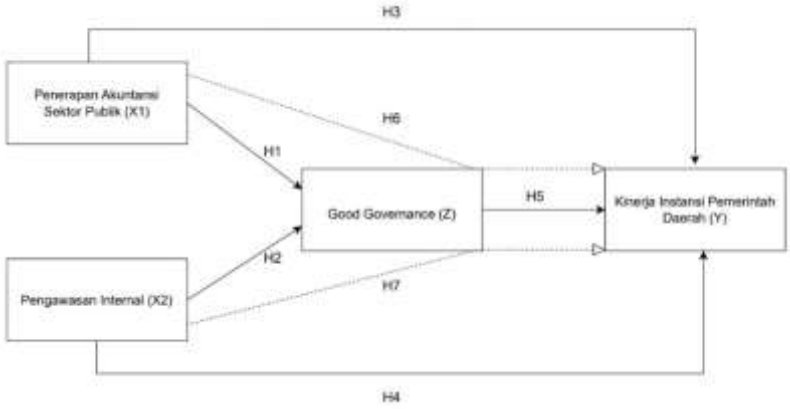
3.7. Pengaruh *Good Governance* Dalam Memediasi Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Selama ini, kelemahan kinerja suatu instansi pemerintah disebabkan oleh kurang optimalnya desain dan implementasi pengawasan internal (Azlina, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan pedoman terkait desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang berlaku di pemerintahan pusat dan daerah melalui PP No. 60 Tahun 2008. Dengan diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal diharapkan pemerintah dapat memberikan jaminan atas kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

H_7: *Good governance* memediasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

4. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

5. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Objek penelitian berfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta, yaitu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian mencakup seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan BPKAD Kota Surakarta. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 50 responden.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), koefisien determinasi (R^2), serta analisis jalur (path analysis) guna mengidentifikasi peran mediasi good governance.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Instrumen Penelitian

Seluruh item kuesioner pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), Good Governance (Z), dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) telah diuji validitasnya menggunakan uji signifikansi dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai di atas 0,60 untuk semua variabel, yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik (0,650), Pengawasan Internal (0,700), Good Governance (0,636) dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (0,833). Dengan demikian, instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel, stabil, dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

6.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance 0.10 dan VIF 10 pada seluruh variabel, menandakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji autokorelasi dengan Run Test memberikan nilai signifikansi > 0,05, sehingga residual bersifat acak dan bebas autokorelasi. Seluruh variabel independen juga lolos uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi 0,05, yang berarti varians residual homogen (homo skedastik). Terakhir, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan dist normal dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regn + digunakan valid dan layak untuk mengestimasi pengaruh variabel independen kinerja instansi pemerintah daerah.

6.3 Teknik Analisis Data

6.3.1 Persamaan 1

Tabel 1 Hasiil Analisis Linier Berganda Persamaan 1

Coefficients[a]					
Model	*Unstd. Coefficients*		*Std. Coefficients*	t	Sig.
	B	*Std. Error*	Beta		

1	*(Constant)*	22,723	3,724		6,102	,000
	PASP	-,262	,129	-,284	-2,023	,049
	PI	,291	,123	,333	2,372	,022
F hitung					3,855	
F sig.					0,028	
R^2					0,141	
Adjusted R^2					0,104	

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil tabel 1 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Z = 22,723 – 0,262 X1 + 0,291 X2 + e

Hasil perhitungan tabel 1 menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki F hitung 3,855 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,028 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Pengawasan Internal (X2) terhadap *Good Governance* (Z). Nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) untuk model ini sebesar 0,104 artinya besarnya pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Pengawasan Internal (X2) terhadap *Good Governance* (Z) sebesar 10,4%. Sisanya (100% - 10,4%) = 89,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model seperti akuntabilitas publik, komitmen organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia dan motivasi kerja..

6.3.2 Persamaan 2

Tabel 2 Hasil Uji Persamaan 2

Coefficients[a]						
Model		*Unstd. Coefficients*		*Std. Coefficients*	t	Sig.
		B	*Std. Error*	Beta		
1	*(Constant)*	7,585	5,589		1,357	,181
	PASP	-,002	,151	-,002	-,015	,988
	PI	,330	,146	,321	2,265	,028
	GG	,335	,164	,286	2,051	,046
F hitung					4,633	
F sig.					0,007	
R^2					0,232	
Adjusted R^2					0,182	

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 7,585 - 0,002 X1 + 0,330 X2 + 0,335 Z + e

Hasil perhitungan tabel 8 menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki F hitung 4,633 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,007 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2) dan *Good Governance* (Z) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y). Nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,182 artinya besarnya pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), dan *Good Governance* (Z) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) sebesar 18,2%. Sisanya (100% - 18,2%) = 81,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model seperti akuntabilitas keuangan daerah, kualitas laporan keuangan daerah, kualitas pelayanan publik dan pencegahan *fraud* anggaran.

6.3.3 Analisis Jalur

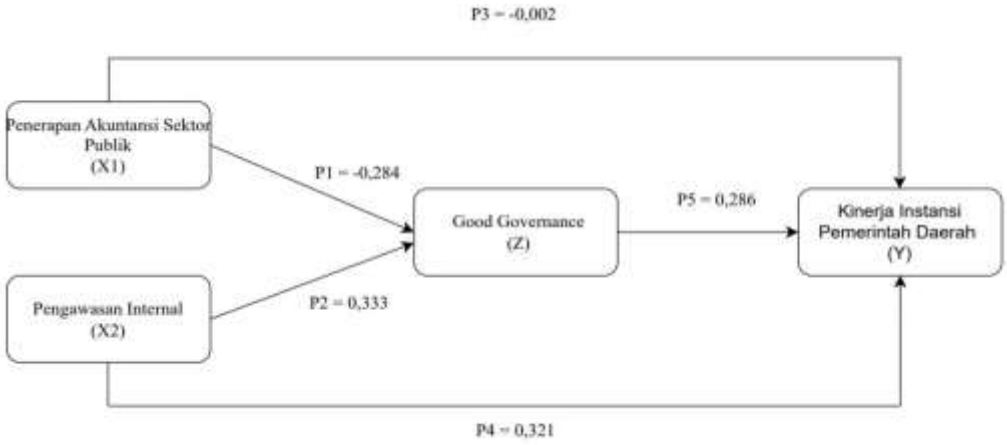
Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi berganda.

a. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

P1 = -0,284 P2 = 0,333 P3 = -0,002

P4 = 0,321 P5 = 0,286

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789



Gambar 2. Hasil Analisis Jalur

b. Pengaruh Tidak Langsung

1) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) melalui *Good Governance* (Z)

Pengaruh Langsung : P3 = -0,002

Pengaruh Tidak Langsung : P1 × P5 = -0,284 × 0,286 = -0,081224

Pengaruh Total : P3 + (P1 × P5) = -0,002 + (-0,081224) = -0,083224

Karena pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung (-0,081224 < -0,002), maka *Good Governance* tidak memediasi pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis enam yang menyatakan bahwa terdapat Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan *Good Governance* sebagai variabel intervening tidak terbukti kebenarannya.

2) Pengaruh Pengawasan Internal (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) melalui *Good Governance* (Z)

Pengaruh Langsung : P4 = 0,321

Pengaruh Tidak Langsung : P2 × P5 = 0,333 × 0,286 = 0,095238

Pengaruh Total : P4 + (P2 × P5) = 0,321 + (0,095238) = 0,416238

Karena pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung (0,095238 < 0,302), maka *Good Governance* tidak memediasi pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis tujuh yang menyatakan bahwa terdapat Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan *Good Governance* sebagai variabel intervening tidak terbukti kebenarannya.

7. PEMBAHASAN

7.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh negatif signifikan terhadap *Good Governance*. Sehingga hipotesis satu yang menyatakan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance* tidak terbukti kebenarannya.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di BPKAD Kota Surakarta kemungkinan disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal dalam memahami dan mengimplementasikan akuntansi sektor publik. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik tidak diawasi secara langsung oleh pimpinan, sehingga pelaksanaanya cenderung hanya bersifat administratif yang mengakibatkan proses akuntansi tidak dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat untuk memperkuat *good governance*. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan sistem akuntansi yang baik saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan budaya organisasi dan kepemimpinan yang menjunjung akuntabilitas dan integritas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Irene (2024) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*.

7.2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap *Good Governance.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*. Sehingga hipotesis dua yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance* terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, di mana pengawasan merupakan mekanisme penting untuk meminimalkan perilaku oportunis agen (dalam hal ini

aparatur pemerintah) dan memastikan bahwa tindakan mereka tetap berada dalam koridor kepentingan publik sebagai pihak prinsipal.

Pengawasan internal yang baik tidak hanya mencegah kesalahan dan penyimpangan, tetapi juga memberikan kejelasan tanggung jawab, transparansi proses, dan evaluasi kinerja yang obyektif, yang merupakan elemen inti dalam penerapan Good Governance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azlina (2020) dan Irene, dkk (2024) dengan hasil penelitian pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance.* Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin baik pengawasan internal maka *good governance* akan semakin tinggi.

7.3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga hipotesis tiga yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah tidak terbukti kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di BPKAD Kota Surakarta belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemungkinan hal ini disebabkan karena akuntansi hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk pelaporan, bukan sebagai alat untuk perencanaan dan evaluasi kinerja secara strategis. Selain itu, penerapan yang belum konsisten atau minimnya pelatihan bagi pegawai juga dapat menyebabkan rendahnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam proses manajerial dan pengambilan keputusan.

7.4. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga hipotesis empat yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah terbukti kebenarannya. Maka semakin kuat dan efektif pengawasan internal yang diterapkan, semakin baik pula kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah. Temuan ini memperkuat teori keagenan yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan mekanisme penting untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, serta memastikan bahwa agen (dalam hal ini aparatur pemerintah) bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan public.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Karlina dkk (2023) bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Intan dan Budi (2022) dan Mubarok dkk (2021) bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga semakin baik pengawasan internal maka kinerja instansi pemerintah daerah pada BPKAD Kota Surakarta cenderung semakin tinggi.

7.5. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkann bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga hipotesis lima yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah terbukti kebenarannya. Penerapan prinsip Good Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pertanggungjawaban menjadi landasan penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika tata kelola berjalan baik, maka sistem kerja dalam organisasi menjadi lebih terstruktur, keputusan lebih tepat sasaran, dan pegawai lebih termotivasi untuk mencapai target kerja secara optimal.

Ketika instansi pemerintah mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, maka proses kerja menjadi lebih efisien, pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun ikut tumbuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wulansari (2024) dan Yusnar dkk (2015) bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa apabila good governance meningkat maka kinerja instansi pemerintah daerah juga akan meningkat.

7.6. Pengaruh *Good Governance* Dalam Memediasi Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil dari analisis jalur, pengaruh langsung penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien beta -0,002. Sedangkan pengaruh tidak langsung penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui *good governance* memperoleh hasil koefisien beta sebesar -0,081224. Hasil ini menunjukkan pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung (-0,081224 < -0,002) maka *good governance* tidak memediasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehinga H6 yang menyatakan bahwa *good governance* memediasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun akuntansi sektor publik diterapkan, pengaruhnya terhadap kinerja tidak diperkuat melalui good governance. Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan. Dengan

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

demikian, implementasi akuntansi sektor publik belum cukup efektif untuk meningkatkan kinerja apabila tidak diiringi oleh internalisasi nilai-nilai Good Governance secara menyeluruh.

7.7. Pengaruh *Good Governance* Dalam Memediasi Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil dari analisis jalur, pengaruh langsung pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien beta 0,330. Sedangkan pengaruh tidak langsung pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui *good governance* memperoleh hasil koefisien beta sebesar 0,095238. Hasil ini menunjukkan pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung (0,095238 < 0,302) maka *good governance* tidak memediasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehinga H7 yang menyatakan bahwa *good governance* memediasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal telah memberikan pengaruh yang kuat secara langsung terhadap peningkatan kinerja, sehingga keberadaan good governance sebagai variabel mediasi menjadi tidak signifikan. Artinya, pengawasan internal yang efektif sudah cukup untuk mendorong tercapainya kinerja yang optimal tanpa perlu melalui mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal yang berjalan secara konsisten telah mampu memastikan efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga kinerja instansi tetap dapat meningkat meskipun tanpa penguatan dari aspek good governance.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif signifikan terhadap good governance, sementara pengawasan internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap good governance dan kinerja instansi pemerintah daerah. Di sisi lain, penerapan akuntansi sektor publik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi. Temuan juga menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Namun, good governance tidak mampu memediasi hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dan kinerja instansi. Hal yang sama juga berlaku pada hubungan antara pengawasan internal dan kinerja instansi, di mana good governance tidak berperan sebagai mediator karena pengawasan internal telah memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap peningkatan kinerja. Secara keseluruhan, pengawasan internal terbukti menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja, sedangkan efektivitas good governance sebagai variabel intervening masih belum optimal.

Oleh karena itu, instansi pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa mekanismenya berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik perlu diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai sarana pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya internalisasi nilai-nilai good governance di semua level organisasi juga penting untuk diintensifkan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata terhadap kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Alya, A. R., & Rino, A. N. (2023). Analisis Kinerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Terhadap Implementasi Smart City Melalui Garuda Smart City Model. *Jurnal Administrasi Negara*, *15*(1), 71–78. https://www.youtube.com/@TelcoMovie

Ayu, S. S. K. (2024). Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jakarta. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, *1 (2)*, 102–109.

Azlina. (2020). Good Governance Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengawasan internal Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris OPD Kabupaten Solok) . *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing (JKAA)*, *4*(1), 9–24.

Belinda, P., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Dalam *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* (Vol. 1, Nomor 1).

Dharu. (2021). Analisis Kinerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Terhadap Implementasi Smart City Melalui Garuda Smart City Model. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *10*(4).

Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Fauzi, A., & Zailani, M. (2020). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *9*(2), 112–123.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25* (A. Tejokusuma, Ed.; 9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Nomor 4). Online. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index

Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *1(1)*, 139–155.

Irene, B. F., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Saurmauli Pangaribuan, W. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. Dalam *Keuangan dan Auditing* (Vol. 5, Nomor 1). Online. https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka

Iskandar, R., & Rizki, D. (2021). Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *13*(1), 35–47.

Karlina, N., Lewaru, T., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3), 300–306. https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.427

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3 ed.). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed.; I). Peneribit ANDI (Anggota IKAPI).

Mubarok, R. Z., Rahmawati, T., & Wulandari, H. K. (2021). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance*, *2*, 45–55.

Pratama Musue, D., & Rauf, Y. (2021). Jambura Accounting Review Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, *2*(2), 100–109.

Rafarni Gea, I. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, *1*(1). https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai

Rahayu, I., & Budi, H. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9(8)*, 2869–2879.

Rahmawati, H., & Heliana. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. . . *In Bandung Conference Series: Accountancy* , *2*(1), 51–58.

Rahmawati, & Puspitasari. (2021). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, *16*(2), 115–127.

Rizal Yahya, M. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* (Vol. 1, Nomor 2).

Sari, R. N., & Suryanto, T. (2020). The effect of internal control and good governance on local government performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *6*(1), 45–54.

Sartika. (2019). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Shalekha, L., & Wahidahwati. (2020). Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi* . Andi Offset.

Wahidahwati. (2021). Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Opd: Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *10*(4).